



Pencapaian Indikator MDGs di Lima Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

MDGs Millennium Development Goals

Tujuan Pembangunan Milenium



1

Menanggulangi Kemiskinan
dan Kelaparan Ekstrem



2

Mencapai pendidikan dasar
Untuk Semua



3

Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan



4

Menurunkan Angka Kematian Anak



5

Meningkatkan Kesehatan Ibu



6

Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan
Penyakit Menular Lainnya



7

Memastikan Kelestarian
Lingkungan Hidup



8

Mengembangkan Kemitraan Global
untuk pembangunan

KATA PENGANTAR

Publikasi buku **Paket-D: Pencapaian Indikator MDGs di Lima Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat** ini merupakan seri keempat dari lima buku paket pemasaran (Paket-A sampai dengan Paket-E) yang disusun dari hasil kegiatan Proyek kerjasama BPS dengan UNICEF tahun 2006 – 2010 di lima kabupaten uji coba, yaitu Kabupaten Bone, Bantaeng dan Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat.

Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak khususnya pada penyelenggara pemasaran di setiap kabupaten/kota agar dapat memahami data dan informasi yang dihasilkan di setiap tujuan dan target MDGs serta manfaatnya untuk pembangunan kabupaten/kota.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan ringkasan dari buku ke- 12 publikasi MDGs yang telah diterbitkan BPS bekerja sama dengan UNICEF tahun 2006-2010. Buku ini menjelaskan tentang pencapaian indikator-indikator MDGs dari setiap kecamatan di lima kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, berdasarkan hasil survei kecamatan tahun 2007.

Kepada tim penyusun di bawah koordinasi saudara Slamet Mukeno yang telah berhasil menyusun buku paket-D ini, disampaikan ucapan terima kasih. Kepada UNICEF dan CIDA yang telah memberikan dukungan dana dan semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaannya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Saran dan kritik membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2009
Kepala Badan Pusat Statistik,

DR. Rusman Heriawan.

<http://www.bps.go.id>

Pencapaian Indikator MDGs di Lima Kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Apa yang akan dipaparkan?

Buku ini memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator MDGs, serta perbandingannya antar kabupaten dan kecamatan. Pemaparan tidak hanya terbatas indikator MDGs, tetapi juga dilengkapi dengan indikator tambahan yang ada hubungannya dengan tujuan dan target MDGs yang dihasilkan dari survei yang sama.

Paparan disesuaikan dengan urutan tujuan dan target MDGs serta diakhiri dengan beberapa indikator tambahan.

Tujuan I: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target I: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari \$ 1 (PPP) per hari menjadi setengahnya antara 1990-2015

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua Negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengukur tingkat kemiskinan penduduk semestinya menggunakan indikator Persentase Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari \$ 1 (PPP) per Hari. Namun karena data tersebut tidak tersedia, maka digunakan “Koefisien Engel” sebagai salah satu proksi untuk mengukur tingkat kemiskinan.

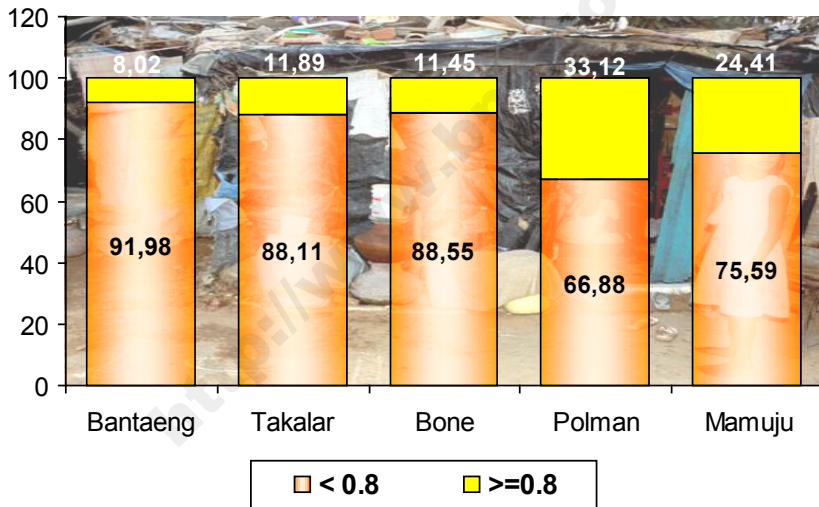
Koefisien Engel

Koefisien Engel merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai pendekatan atau proksi untuk mengukur tingkat kemiskinan. Batasan yang ditetapkan adalah 0,8, artinya: apabila 80 persen atau lebih dari pendapatan yang diperoleh tiap penduduk digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, maka yang bersangkutan dapat dikatakan mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah (miskin).

Keadaan Koefisien Engel di Kabupaten

Persentase pengeluaran untuk makanan dengan batasan koefisien Engel $\geq 0,80$ persen paling tinggi terdapat di Kabupaten Polewali Mandar (33,12 persen), sedangkan terendah di Kabupaten Bantaeng (8,02 persen). Artinya, tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Polewali Mandar relatif lebih rendah, dan tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bantaeng relatif lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Pola di atas sejalan dengan data kemiskinan hasil Susenas, BPS.

Gambar 1: Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Nilai Koefisien Engel menurut Kabupaten, Tahun 2007



Kecamatan Tubbi Taramanu di Kabupaten Polewali Mandar merupakan kecamatan yang paling rendah tingkat kesejahteraannya karena hampir tiga per empat penduduknya masuk kriteria miskin (72,38 persen). Sementara Kecamatan Sinoa di Kabupaten Bantaeng merupakan kecamatan yang paling tinggi tingkat kesejahteraannya (3,67 persen).

Data seperti ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan salah satu rujukan bagi Pemerintah Daerah Polman untuk menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu guna mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya ke taraf yang lebih baik dimasa-masa mendatang

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara 1990-2015

Apa Indikatornya?

Indikator yang digunakan sebagai proksi terhadap penduduk yang menderita kelaparan adalah prevalensi balita kurang gizi.

Prevalensi Balita Kurang Gizi

Prevalensi balita kurang gizi adalah perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya di suatu daerah pada satu tahun tertentu dinyatakan dalam persen.

Bagaimana mendapatkan Prevalensi Balita Kurang Gizi?

Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui berat badan, umur dalam bulan, dan jenis kelamin.

Prevalensi balita kurang gizi adalah gabungan antara balita berstatus gizi buruk dan balita berstatus gizi kurang.

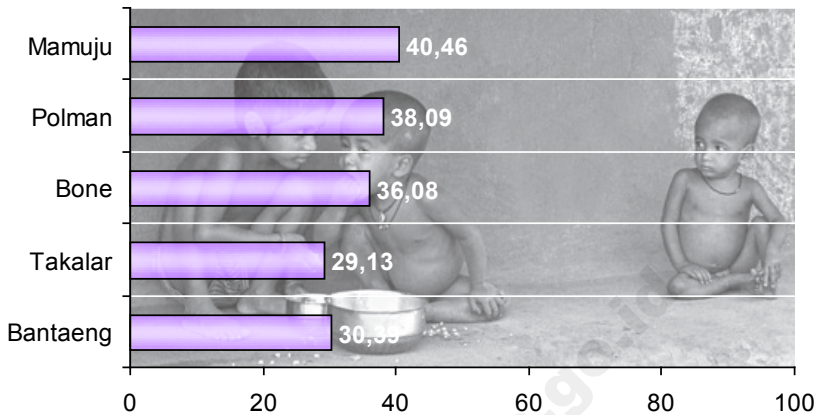
Prevalensi balita kurang gizi dapat dilihat dengan dua cara yaitu pertama berdasarkan perbandingan ukuran berat badan terhadap umur, dan kedua berdasarkan perbandingan ukuran tinggi badan terhadap umur.

Keadaan Status Kurang Gizi di Kabupaten

Berdasarkan perbandingan berat badan dan umur, balita dengan status kurang gizi paling banyak dijumpai di Kabupaten Mamuju (40,46 persen) terutama di Kecamatan Tapalang (53,56 persen). Sementara balita dengan status kurang gizi paling sedikit dijumpai di Kabupaten Takalar (29,13 persen) terutama di Kecamatan Polombangkeng Selatan (21,14 persen).

Data ini kiranya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan upaya-upaya tertentu guna mengurangi banyaknya balita bergizi buruk atau kurang gizi di tahun-tahun mendatang.

Gambar 2: Persentase Balita menurut Status Kurang Gizi (Berdasarkan BB/Umur) menurut Kabupaten, 2007



Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 3: Memastikan pada Tahun 2015 Semua Anak-anak Dimanapun, Laki-laki maupun Perempuan Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar

Indikator yang disajikan meliputi Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs serta Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun.

Untuk Apa Angka Partisipasi Murni (APM) Dihitung?

Indikator ini digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. Misalnya, penduduk usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI, penduduk usia 13-15 tahun bersekolah di SLTP/MTs, dan seterusnya.

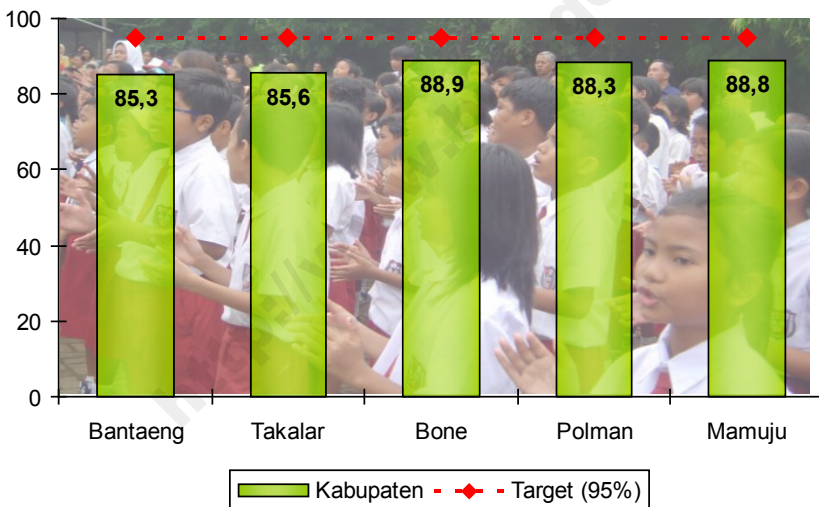
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD/MI)

APM SD/MI adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama, dinyatakan dalam persen.

Target MDGs pada tahun 2015: APM SD/MI dianggap berhasil bila sudah mencapai 95 persen, apakah sudah tercapai?

APM SD/MI di lima kabupaten masih belum mencapai target, karena masih berkisar antara 85 hingga 88 persen. Namun di tingkat kecamatan terdapat tiga kecamatan yang hampir mencapai target, yaitu Kecamatan Tubbi Taramanu di Polman (94,9 persen), Kecamatan Ponre di Bone (94,5 persen), dan Kecamatan Tapalang Barat di Mamuju (94,27 persen). Sementara Kecamatan Pajukukang di Bantaeng (78,2 persen) merupakan kecamatan yang pencapaiannya paling rendah.

Gambar 3: APM SD/MI menurut Kabupaten, Tahun 2007



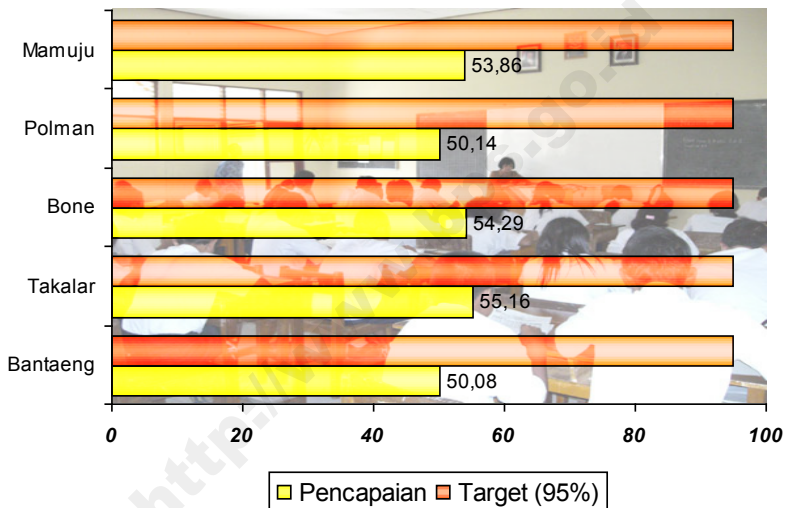
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

APM SMP/MTs adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama, dinyatakan dalam persen.

Target MDGs pada tahun 2015: APM SMP/MTs dianggap berhasil bila sudah mencapai 95 persen, apakah sudah tercapai?.

APM SMP/MTs di lima kabupaten masih sangat jauh dari target, yaitu berkisar antara 50 hingga 55 persen. Hal yang sama juga dijumpai di tingkat kecamatan dengan kisaran antara 26,8 persen (Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman) hingga 75,3 persen (Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone)

Gambar 4: APM SMP/MTs menurut Kabupaten, Tahun 2007



Angka Melek Huruf (AMH)

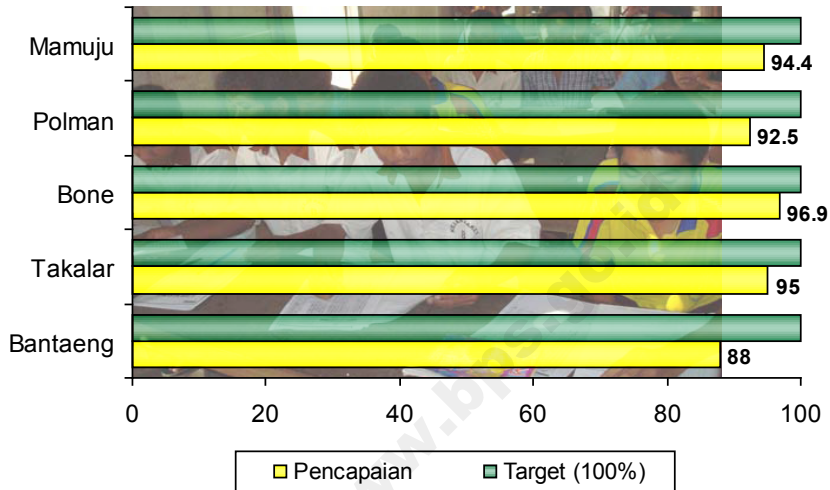
AMH adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu (15-24 tahun, 15 tahun ke atas, 45 tahun ke atas) yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, dengan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur tersebut.

Untuk Apa AMH Dihitung?

AMH penduduk usia 15-24 tahun menggambarkan hasil dari pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

Target MDGs pada tahun 2015: Penduduk usia 15-24 tahun sudah bebas buta huruf atau AMH penduduk usia 15-24 tahun 100 persen, apakah sudah tercapai?

Gambar 5: AMH Penduduk Usia 15-24 tahun menurut Kabupaten, Tahun 2007



AMH penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamuju masih kurang dari 95 persen. Di tingkat kecamatan terdapat dua kecamatan yang capaian AMH masih kurang dari 90 persen, yaitu Kecamatan Bulu di Kabupaten Polman (77,0 persen) dan Kecamatan Kalimpang di Kabupaten Mamuju (88,81 persen)

Beberapa program pemerintah telah diluncurkan untuk mengatasi masalah melek huruf tersebut, seperti Kursus A-B-C, Kejar Paket-A, Keaksaraan Fungsional (KF).

Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

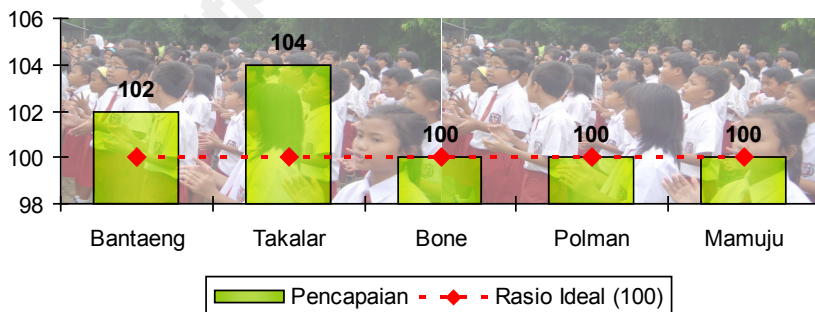
MDGs menempatkan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, terutama bidang pendidikan, pekerjaan dan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun data partisipasi perempuan di bidang politik tidak dapat ditampilkan karena tidak ada dalam survei.

Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-laki di Tingkat Sekolah Dasar (SD/MI).

Bagaimana gambarannya di Kabupaten?

Perempuan yang bersekolah tepat waktu di SD/MI sama banyak dan bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu di Kabupaten Bantaeng dan Takalar. Di tingkat kecamatan masih banyak perempuan yang belum bersekolah tepat waktu dibanding laki-laki terutama di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone (85 persen).

Gambar 6: Rasio APM SD/MI menurut Kabupaten, Tahun 2007

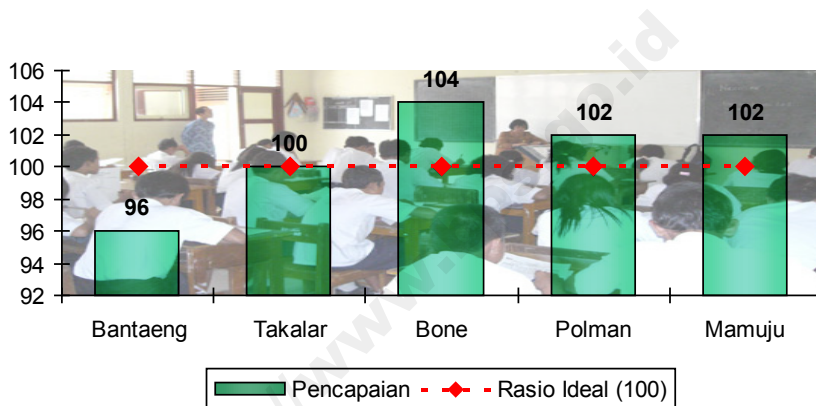


Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) Anak Perempuan terhadap Anak Laki-Laki di Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SMP/MTs).

Bagaimana gambarannya di Kabupaten?

Rasio APM di jenjang SMP/MTs umumnya lebih dari 100, kecuali di Kabupaten Bantaeng hanya sebesar 96 persen. Di tingkat kecamatan, kesenjangan tertinggi terjadi di Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman (43 persen).

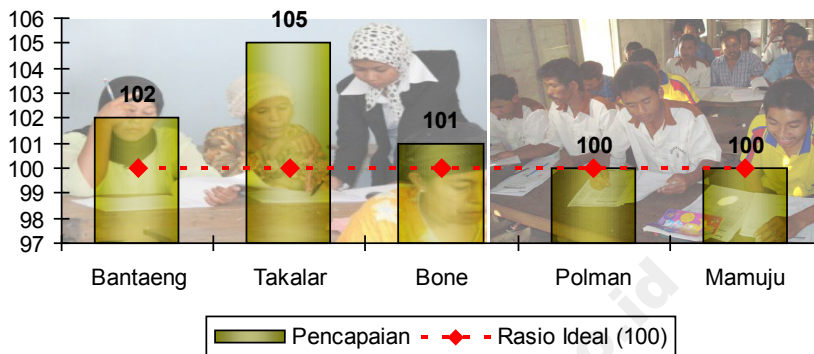
Gambar 7: Rasio APM SMP/MTs menurut Kabupaten, Tahun 2007



Rasio Angka Melek Huruf Usia 15-24 Tahun (Indeks Paritas). Bagaimana gambarannya di Kabupaten?

Rasio AMH kelompok usia 15-24 tahun di Kabupaten Takalar, Bantaeng, dan Bone sudah di atas 100, sedangkan di Polman dan Mamuju tepat 100. Namun di tingkat kecamatan masih dijumpai Rasio AMH yang kurang dari 100 persen. Kesenjangan tertinggi terjadi di Kecamatan Bulu, Kabupaten Polman (82 persen).

Gambar 8: Rasio AMH Penduduk Usia 15-24 Tahun menurut Kabupaten, Tahun 2007



Kontribusi Pekerja Upahan Perempuan di Sektor Non Pertanian (KPPNP).

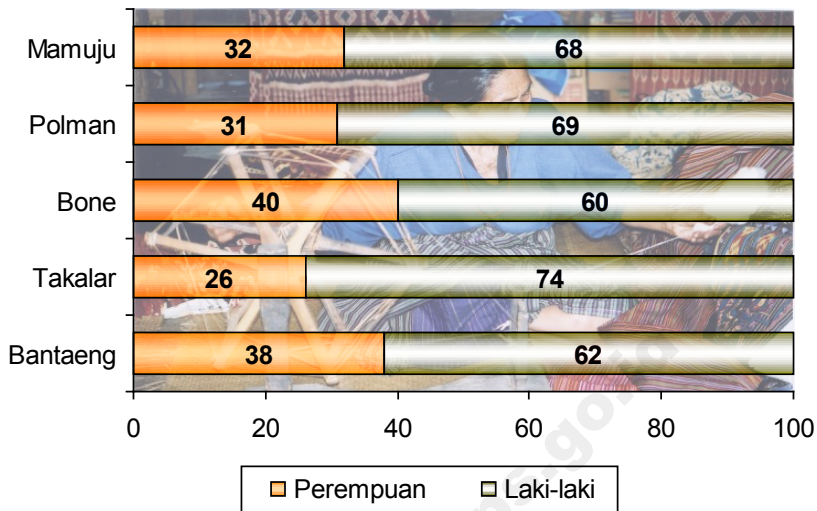
KPPNP adalah perbandingan antara pekerja upahan perempuan berumur 15 tahun ke atas di sektor non pertanian terhadap total pekerja upahan berumur 15 tahun ke atas di sektor tersebut, dan dinyatakan dalam persentase. Pekerja Upahan adalah mereka yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan.

Sektor non pertanian meliputi sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, energi dan air bersih, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, perbankan dan lembaga keuangan, serta jasa pemerintah/swasta.

Bagaimana gambarannya di Kabupaten?

Kontribusi pekerja upahan perempuan di sektor non-pertanian di lima kabupaten kurang dari 50 persen. KPPNP terendah terdapat di Kabupaten Takalar sebesar 26 persen, artinya dari 100 pekerja upahan di sektor non- pertanian, kontribusi laki-laki sebesar 74 persen sedangkan perempuan 26 persen. Hal yang sama terjadi pula di tingkat kecamatan, kecuali di lima kecamatan di Kabupaten Bone KPPNP sudah lebih dari 50 persen.

Gambar 9: KPPNP menurut Kabupaten, Tahun 2007



Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990-2015

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis pencapaian target 5 ini, yang meliputi: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan imunisasi campak bagi balita usia 12-23 bulan.

Angka Kematian Bayi (AKB)

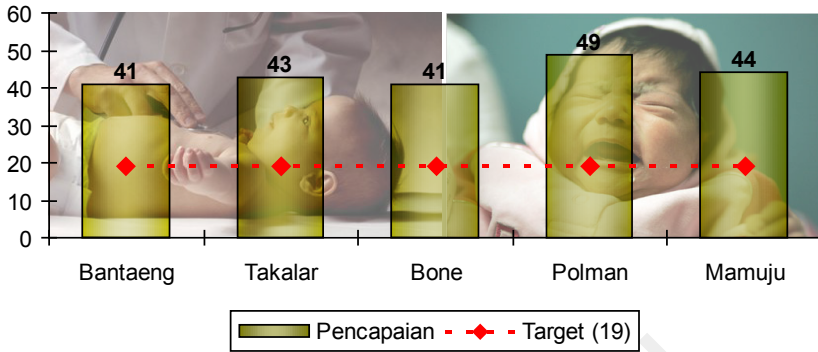
AKB merupakan perbandingan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dengan jumlah bayi yang dilahirkan hidup pada tahun yang sama dikalikan dengan 1000

Kedaaan AKB di Kabupaten

AKB di lima kabupaten masih cukup jauh dari target yang ingin di capai sebesar 19 kematian dari 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

AKB tertinggi di Kabupaten Polman yaitu sebesar 49. Artinya, di Kabupaten Polman terdapat 49 bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dari 1000 kelahiran hidup.

Gambar 10: Angka Kematian Bayi (AKB) Menurut Kabupaten Tahun 2007



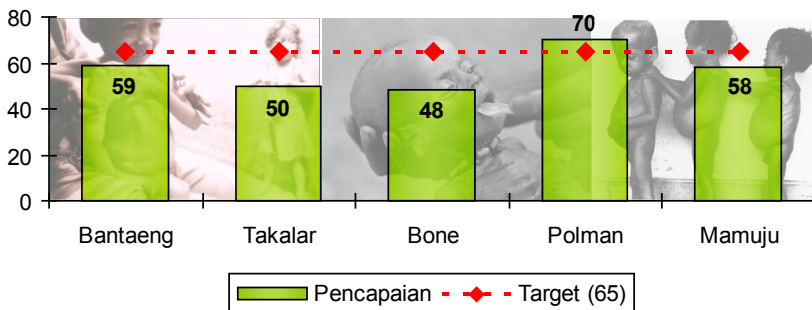
Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan perbandingan antara balita yang dilahirkan pada tahun tertentu yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun, dengan jumlah balita pada tahun yang sama dikalikan dengan 1000.

Keadaan AKABA di Kabupaten

Umumnya AKABA telah berada dibawah 65 per 1000 balita, kecuali Kabupaten Polman masih 70 per 1000 balita. Dengan demikian empat kabupaten telah mencapai target (sudah lebih kecil) dari yang ditetapkan oleh World Summit for Children (WSC) yaitu 65 per 1000 balita pada tahun 2000. Kabupaten Polman masih harus berusaha keras untuk dapat menurunkan AKABA ini sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan, atau dapat mengikuti keberhasilan dari kabupaten lainnya.

Gambar 11: Angka Kematian Balita (AKABA), Menurut Kabupaten, Tahun 2007

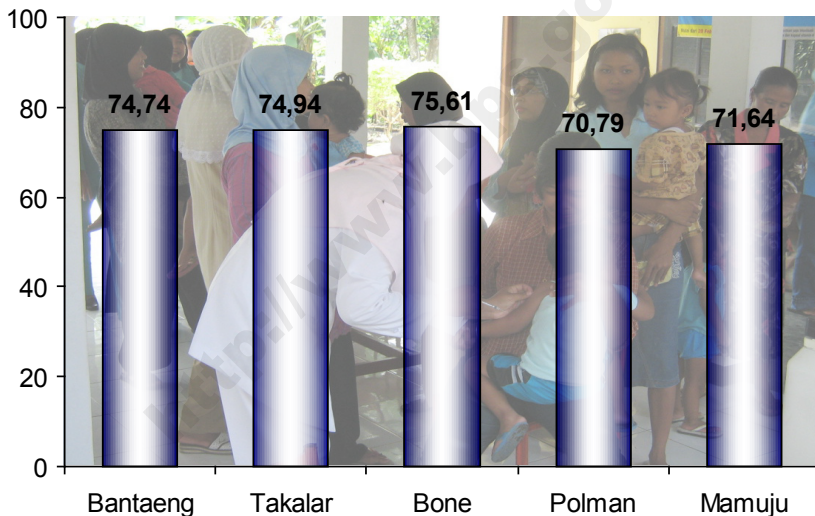


Pemberian Imunisasi Campak.

Anak usia 12-23 bulan yang telah mendapat imunisasi campak pada umumnya sudah diatas 70 persen dan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Bone, yaitu 75,61 persen, sedangkan yang terendah terjadi di kabupaten Polman, baru mencapai 70,79 persen.

Di tingkat kecamatan sudah ada yang mencapai 100 persen, yaitu di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Sementara yang terendah terjadi di Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polman yaitu sebesar 18,84 persen

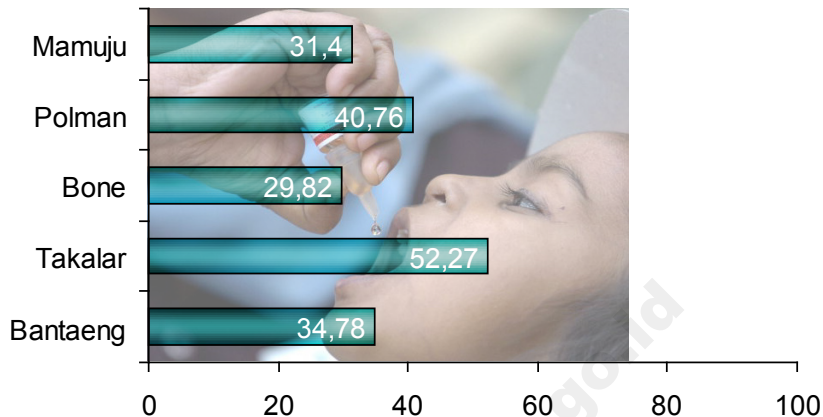
Gambar 12: Persentase Anak Usia 12-23 Bulan yang Pernah Diimunisasi Campak Menurut Kabupaten, Tahun 2007



Persentase Balita yang Telah Mendapat Imunisasi Lengkap

Balita yang mendapat imunisasi lengkap, terlihat cukup baik di Kabupaten Takalar yaitu sebesar 52,27 persen. Demikian pula di Kabupaten Polman, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap mencapai 40,76 persen. Yang paling rendah adalah di Kabupaten Mamuju dengan persentase sebesar 31,40 persen.

Gambar 13: Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Kabupaten, Tahun 2007



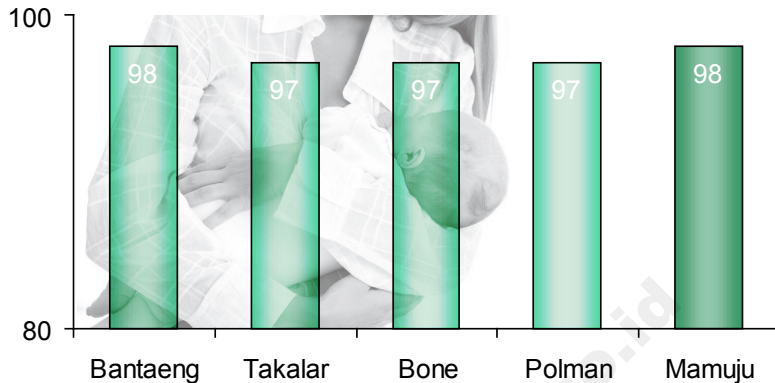
Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, menyusui merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak dilahirkan tanpa memberikan makanan tambahan, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Setelah ASI tidak lagi cukup mengandung protein dan kalori, seorang bayi mulai memerlukan minuman/makanan pendamping ASI.

Persentase Penduduk Berusia 2-4 Tahun yang Mendapatkan ASI

Hasil survei MDGs kecamatan menunjukkan pemberian ASI pada anak usia 2-4 tahun sudah cukup tinggi yaitu sekitar 97 persen. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pola pemberian ASI. Demikian pula bila dibandingkan antar kabupaten, hampir di semua kabupaten menunjukkan pola pemberian ASI yang cukup baik.

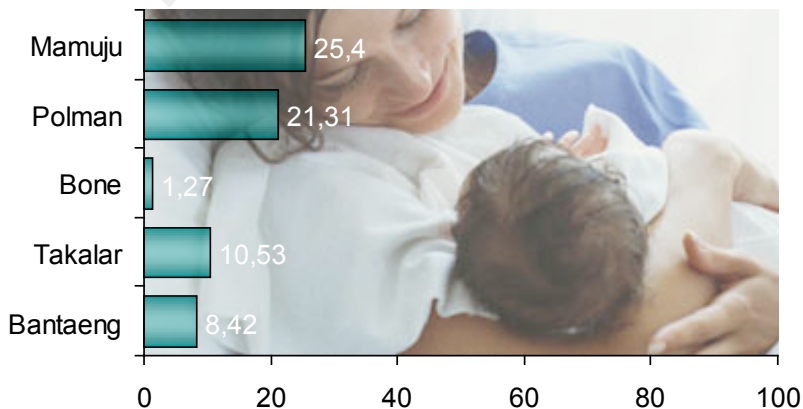
Gambar 14: Persentase Penduduk Usia 2-4 Tahun yang Mendapat ASI menurut Kabupaten, Tahun 2007



Persentase Anak Balita yang Mendapat ASI Eksklusif

Persentase pemberian ASI eksklusif terhadap bayi usia 0-6 bulan sangat bervariasi. Sekitar seperempat jumlah bayi pada usia tersebut di Kabupaten Mamuju mendapat ASI eksklusif, dan sekitar 21 persen di Kabupaten Polman. Persentase pemberian ASI eksklusif yang terendah yaitu hanya 1,27 persen terjadi di Kabupaten Bone.

Gambar 15: Persentase Anak Usia 0-6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif menurut Kabupaten, Tahun 2007



Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu**Target 6: Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Sebesar Tiga Perempatnya antara Tahun 1990-2015**

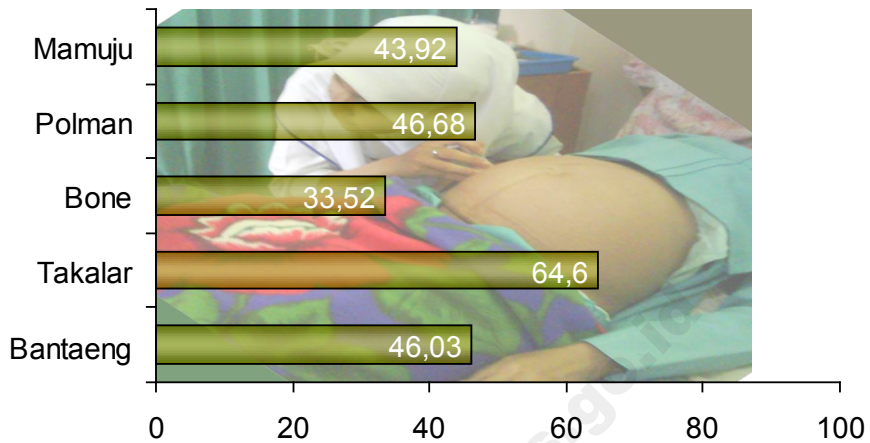
Data AKI selama ini hanya dapat mewakili tingkat nasional, sehingga tidak dapat ditampilkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, untuk mengetahui gambaran tentang kematian ibu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan indikator proksi. Indikator proksi yang disajikan diantaranya Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4, Proporsi Pertolongan Kelahiran Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih, dan Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Berumur 15-49 Tahun yang Mengikuti Program Keluarga Berencana.

Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4.

Kabupaten yang mempunyai persentase K4 terbaik adalah Takalar, dimana lebih dari 64 persen ibu-ibu hamil mendapatkan pemeriksaan K4. Adapun di kabupaten Bone, ibu-ibu yang mendapat pemeriksaan K4 hanya sekitar 33 persen atau hampir setengahnya dari Kabupaten Takalar. Keadaan seperti ini semestinya menjadi bahan perhatian dari Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bone, untuk menghimbau ibu-ibu hamil supaya lebih teratur/sering memeriksakan kehamilannya agar keadaan ibu dan bayi yang dikandungnya bisa lebih terkontrol kesehatannya.

Di tingkat kecamatan masih dijumpai ibu-ibu yang mendapat pemeriksaan K4 kurang dari 5 persen, yaitu di Kecamatan Kalimpang, Mamuju (1,09 persen) dan Kecamatan Tellu Limpo, Bone (4,69 persen)

Gambar 16 : Persentase Balita yang Ibunya Mendapatkan Pemeriksaan Antenatal K4, Menurut Kabupaten, Tahun 2007

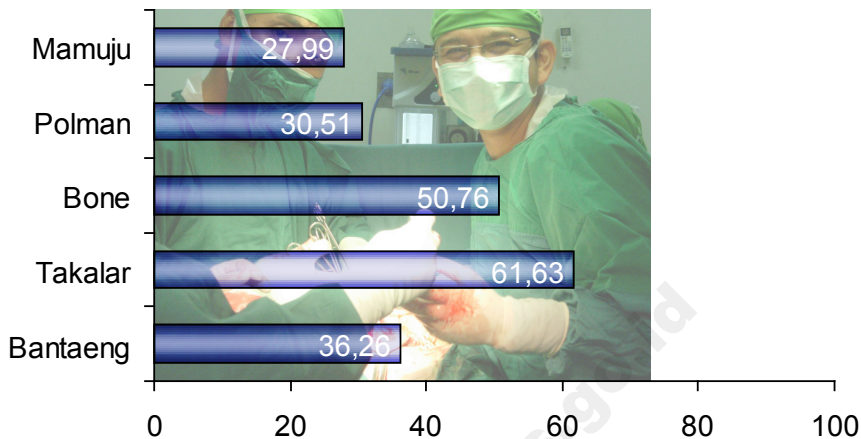


Proporsi Pertolongan Kelahiran Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih merupakan hal yang sangat penting mengingat angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu yang menjadi target dalam program kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan cakupan pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih dari 60 persen (tahun 1998) menjadi 90 persen pada tahun 2010

Hasil survey MDGs kecamatan menunjukkan bahwa balita yang ketika kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di lima kabupaten itu masih relatif rendah, terutama di kabupaten Mamuju, Polman dan Bantaeng yang masing-masing hanya sebesar 27,99, 30,51 dan 36,26 persen. Namun bila dipilah per kecamatan, terdapat kecamatan yang sudah mencapai lebih dari 90 persen, yaitu di Kecamatan Tanete Riattang, Bone

Gambar 17: Persentase Balita yang Kelahirannya Ditolong Nakes, menurut Kabupaten Tahun 2007.

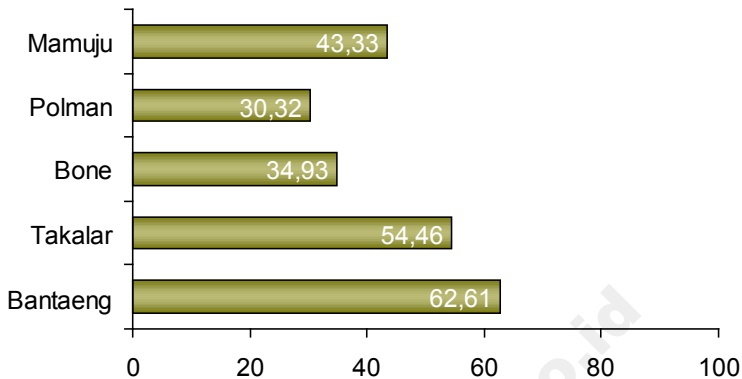


Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Berumur 15-49 Tahun yang Mengikuti Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) dimaksudkan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sehingga terbentuk keluarga kecil yang berkualitas. Sayangnya program ini tidak/belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, terbukti dengan masih cukup rendahnya PUS yang melakukan program KB, yaitu hanya berkisar antara 30-63 persen, khususnya di kabupaten Polman dan Bone yang masih dibawah 35 persen. Nampaknya program KB perlu digalakkan terus di lima kabupaten ini agar pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan.

Di tingkat kecamatan, PUS yang paling banyak menggunakan alat/cara KB terdapat di Kecamatan Bissappu, Bantaeng (71,10 persen) sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Alu, Polewali Mandar (4,86 persen)

Tabel 18: Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2007



Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular Lainnya.

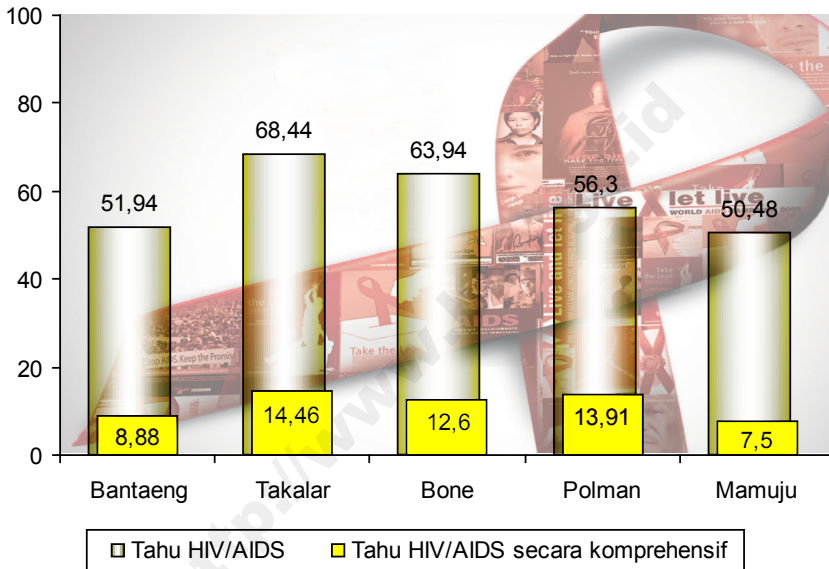
Target 7: Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan Mulai Menurunnya Jumlah Kasus Baru pada 2015 Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Mempunyai Pengetahuan Secara Komprehensif Tentang HIV/AIDS.

Seseorang dikatakan mempunyai pengetahuan tentang HIV/AIDS , yaitu bila mereka mengetahui secara benar proses penyebaran HIV/AIDS dan cara pencegahannya. Penyebaran HIV/AIDS dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, IDU (*Injection Drug User*) yang menggunakan jarum suntik yang terkontaminasi HIV serta transmisi dari ibu kepada anak bayinya.

Pada kelompok umur 15-24 tahun, terdapat perbedaan yang mencolok antara mereka yang mempunyai pengetahuan secara komprehensif tentang HIV/AIDS dengan mereka yang sekedar tahu tentang HIV/AIDS. Mereka yang mengetahui secara komprehensif hanya berkisar antara 7-15 persen saja, sementara yang sekedar tahu tentang HIV/AIDS mencapai sekitar 50-69 persen. Mengingat pentingnya pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS ini, perlu dilakukan peningkatan upaya sosialisasi agar mereka yang semula hanya sekedar tahu bisa meningkat pengetahuannya menjadi komprehensif.

Pada tingkat kecamatan terdapat empat kecamatan yang remajanya sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS, yaitu satu di Kabupaten Mamuju dan tiga di Kabupaten Bone.

Gambar 19: Persentase Penduduk Berumur 15-24 Tahun yang Mengetahui HIV/AIDS dan yang Mempunyai Pengetahuan Komprehensif Mengenai HIV/AIDS , Tahun 2007



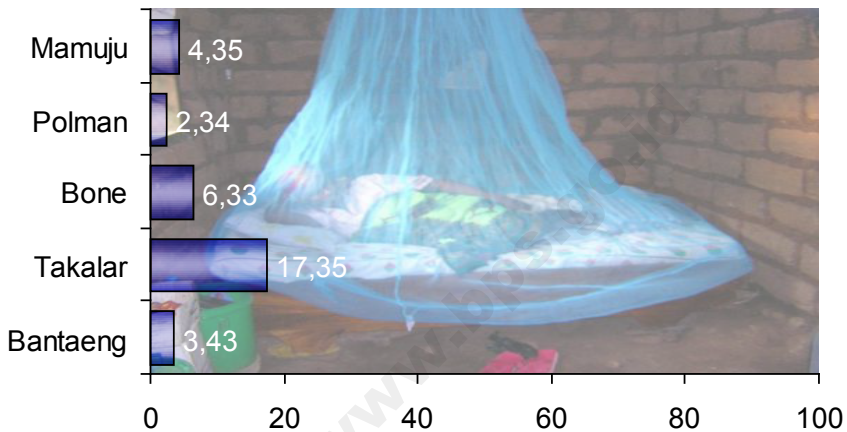
Target 8: Mengendalikan Penyakit Malaria dan Mulai Menurunnya Jumlah Kasus Malaria dan Penyakit Lainnya pada 2015

Proporsi Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu Khusus Diproteksi Dengan Insektisida

Cara pencegahan yang efektif untuk memerangi malaria adalah memakai kelambu yang telah diproteksi dengan insektisida. Namun demikian ternyata balita yang tidur dengan menggunakan kelambu yang diproteksi khusus dengan insektisida di lima kabupaten itu masih relatif rendah yaitu berkisar antara 2-18 persen saja.

Diantara lima kabupaten tersebut, hanya kabupaten Takalar yang penggunaan kelambu yang diproteksi dengan insektisida yang agak tinggi yaitu 17,35 persen, lainnya masih sangat rendah yaitu hanya dibawah tujuh persen. Gambaran yang sama juga terjadi pada tingkat kecamatan.

Gambar 20: Persentase Balita yang Tidur Menggunakan Kelambu yang Diproteksi Khusus Dengan Insektisida, Tahun 2007.



Tujuan 7: Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup.

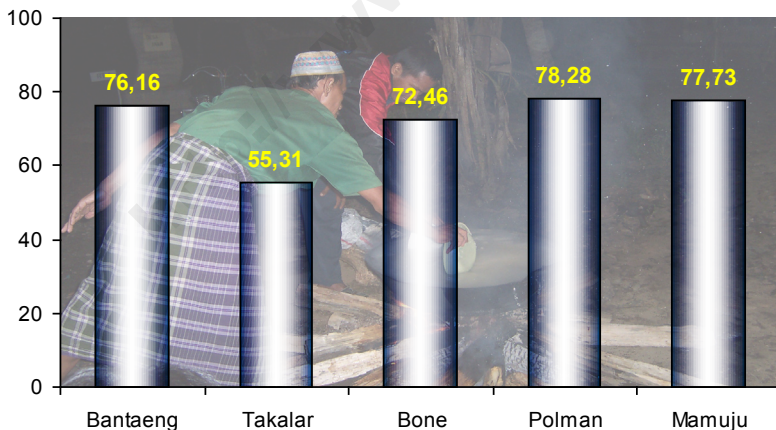
Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kegiatan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun tingkat global berpengaruh terhadap kondisi lingkungan makhluk hidup khususnya manusia. Meningkatnya pembangunan perekonomian berdampak meningkatkan perluasan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, sekaligus mengurangi kemiskinan. Namun disisi lain, pembangunan ekonomi berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menghasilkan limbah industri yang dapat mencemari udara, tanah dan air, yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan manusia.

Target 9: Memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan Kebijakan dan Program Nasional serta Mengembalikan Sumber Daya Lingkungan yang Hilang.

Proporsi Penduduk atau rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat (biomassa) untuk memasak.

Data hasil survei di lima kabupaten menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang menggunakan biomassa yaitu bahan bakar yang berasal dari kayu bakar, arang/briket, sekam, batang padi, tempurung kelapa, tandan kelapa dan sebagainya., sebagai bahan bakar untuk memasak. Dari lima kabupaten yang disurvei itu, terdapat empat kabupaten dimana rumah-tangga yang menggunakan biomassa untuk memasak melebihi 70 persen. Hanya kabupaten Takalar yang penggunaan biomassa relatif rendah yaitu 55,31 persen.

Gambar 21: Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar Padat (Biomassa) Untuk Memasak menurut Kabupaten dan Tipe Daerah, tahun 2007

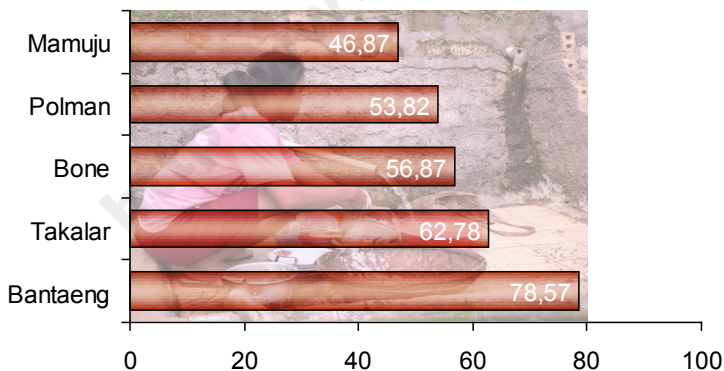


Target 10: Menurunkan Separuh Proporsi Penduduk tanpa Akses terhadap Sumber Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada Tahun 2015

Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum yang Terlindungi dan Berkelanjutan

Di Kabupaten Mamuju dan Polman, rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-harinya baru sekitar 50 persennya. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan upaya-upaya tertentu agar masyarakatnya dapat memperoleh akses guna mendapatkan air yang bersih untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di tingkat kecamatan, perhatian perlu diberikan kepada Kecamatan Tommo di Mamuju, Kecamatan Bontocani di Bone, dan Kecamatan Alu di Polewali Mandar karena akses air bersih kurang dari 20 persen.

Gambar 22: Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Untuk Minum yang Berkelanjutan Menurut Kabupaten, Tahun 2007.

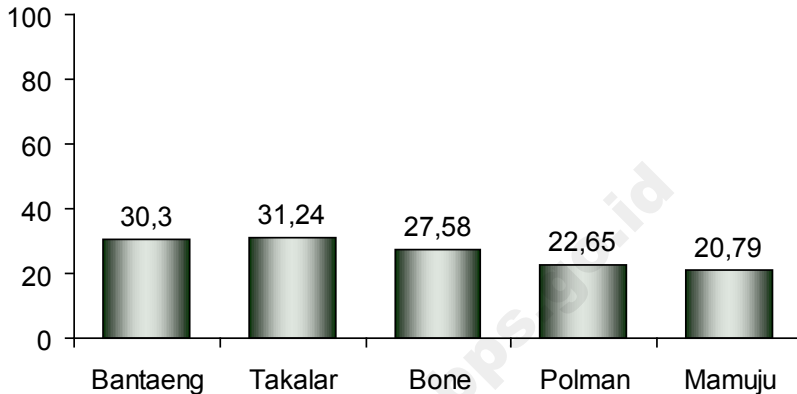


Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak.

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas jamban milik sendiri yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan leher angsa dan tanki septik. Secara umum rumah tangga yang memiliki sanitasi layak masih rendah, yaitu berkisar antara 20,79 persen di Kabupaten

Mamuju hingga 31,24 persen di Kabupaten Takalar. Sosialisasi kepada penduduk untuk mengusahakan sanitasi yang layak perlu terus dilakukan agar tingkat kesehatan penduduk semakin membaik.

Gambar 23: Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Layak menurut Kabupaten, Tahun 2007.



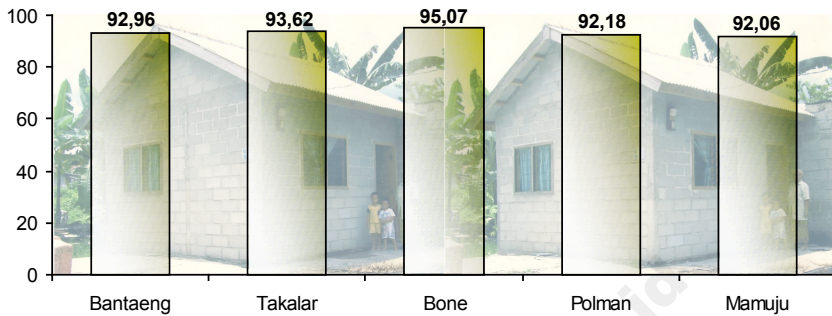
Target II: Mencapai Perbaikan yang Berarti dalam Kehidupan Penduduk Miskin di Permukiman Kumuh pada Tahun 2020

Data mengenai pemukiman kumuh sangat sulit diperoleh dan tidak dapat dikumpulkan melalui survei rumah tangga. Karena itu untuk mengetahui gambaran pemukiman kumuh itu, digunakan dua indikator sebagai pendekatan (proksi), yaitu rumah yang tetap adalah rumah milik sendiri, sewa atau kontrak, sedangkan rumah terjamin didekati (proksinya) berupa kepemilikan sertifikat rumah dari BPN. Selain dari kedua indikator itu, disajikan pula satu indikator tambahan yaitu rumah layak huni.

Kemampuan Penduduk Memenuhi Kebutuhan Perumahan.

Penduduk umumnya telah dapat memenuhi kebutuhan perumahannya dengan sangat baik. Lebih dari 90 persen rumah yang ditempati sudah berstatus tetap dan terjamin. Dalam hal memenuhi kebutuhan perumahan, nampaknya tidak ada masalah yang berarti bagi penduduk sehingga prioritas pembangunan dapat dialihkan ke bidang lain, sambil tetap melakukan usaha untuk menurunkan persentase penduduk yang menempati rumah tidak tetap dan terjamin.

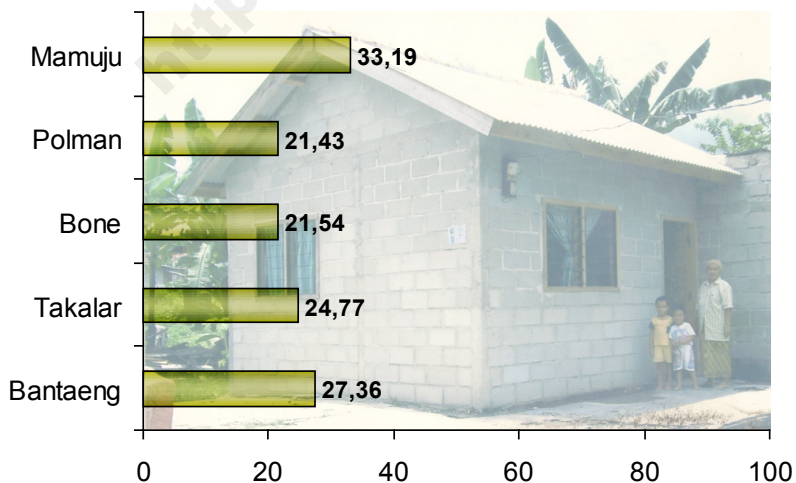
Gambar 24: Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tetap dan Terjamin Menurut Kabupaten, Tahun 2007



Proporsi Penduduk atau Rumah Tangga yang menempati Rumah Milik Sendiri Bersertifikat dari BPN.

Indikator ini berguna untuk menunjukkan persentase penduduk dengan tingkat kesadaran hukum yang baik dan mempunyai kesejahteraan serta kemampuan ekonomi masyarakat yang baik di suatu daerah.

Gambar 25: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Tanah dari BPN menurut Kabupaten, Tahun 2007



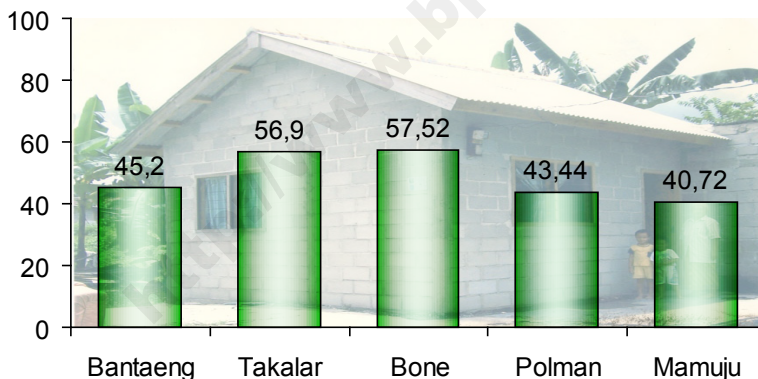
Secara umum kepemilikan sertifikat tanah dari BPN di lima kabupaten itu masih rendah, terutama di Kabupaten Polewali Mandar (21,43 persen) dan Kabupaten Bone (21,54 persen).

Rumah Layak Huni

Sekitar separuh penduduk di kabupaten-kabupaten lokasi Survei MDGs Kecamatan menempati rumah layak huni. Persentase tertinggi terjadi di Kabupaten Bone (57,52 persen) dan terendah di Kabupaten Mamuju (40,72 persen)

Gambaran ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang perlu untuk didorong dan diupayakan agar tingkat kehidupan mereka bisa lebih meningkat sehingga dapat menempati rumah yang lebih layak huni. dimasa mendatang.

Gambar 26: Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni menurut Kabupaten, Tahun 2007



Indikator Tambahan Lainnya

Akte Kelahiran

Akte kelahiran sangat penting dimiliki oleh setiap anak yang merupakan salah satu pemenuhan hak-hak anak dan jaminan masa depannya. Namun penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akte kelahiran masih rendah yaitu berada pada kisaran 20-48 persen. Persentase tertinggi tercatat di Kabupaten Bone (47,54%), dan terendah terjadi di Kabupaten Mamuju yaitu hanya 20,18 persen.

Proporsi anak yang bekerja berumur 7-15 tahun

Seharusnya anak usia 7-15 tahun sehari-harinya selalu berada di sekolah serta tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi dengan alasan apapun. Tapi kenyataannya masih ditemukan anak usia 7-15 tahun yang bekerja, yaitu berkisar antara 5-11 persen. Persentase anak laki-laki yang bekerja lebih besar dibanding anak perempuan.

Tabel 1. Persentase penduduk berumur 7-15 Tahun yang bekerja menurut kabupaten dan jenis kelamin, 2007

Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	T o t a l
Bantaeng	6,66	4,18	10,84
Takalar	4,98	0,65	5,63
B o n e	3,82	1,38	5,21
Polman	5,47	3,24	8,71
Mamuju	4,60	1,87	6,47

Anak usia 7-15 tahun yang bekerja banyak dijumpai di Kabupaten Bantaeng (10,84 persen) sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Bone (5,21 persen).

Proporsi anak berumur 5-17 tahun yang bekerja

Bila rentang umur anak diperlebar menjadi 5-17 tahun, ternyata karakteristik anak usia 5-17 tahun yang bekerja mempunyai pola yang tidak berbeda dengan anak usia 7-15 tahun yang bekerja.

Tabel 2. Persentase Penduduk Berumur 5-17 Tahun yang Bekerja menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin, 2007

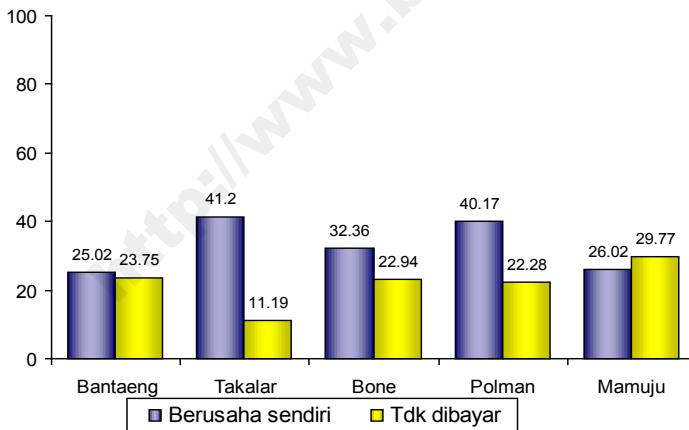
Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	T o t a l
Bantaeng	8,01	4,49	12,50
Takalar	6,20	1,17	7,37
B o n e	5,33	1,99	7,32
Polman	3,90	6,80	10,7
Mamuju	6,03	2,35	8,38

Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan berusaha sendiri dan pekerja tak dibayar

Takalar merupakan kabupaten yang persentase tenaga kerja berstatus berusaha sendiri paling tinggi diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 41,02 persen. Sebaliknya Bantaeng merupakan kabupaten dengan persentase terendah, yaitu 25,02 persen.

Pola yang berbeda dengan di atas terjadi pada tenaga kerja yang berstatus sebagai pekerja tak dibayar. Kabupaten Takalar merupakan kabupaten yang persentase tenaga kerja berstatus sebagai pekerja tak dibayar terendah, yaitu hanya 11,19 persen. Sedangkan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Mamuju, yaitu hampir mencapai 30,0 persen.

Gambar 27. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan, 2007

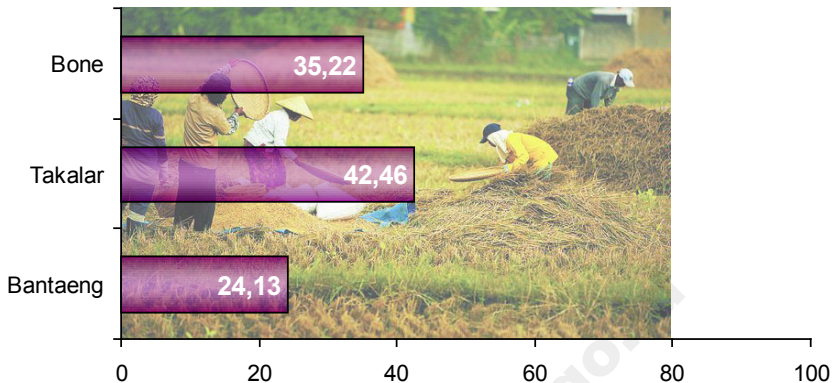


Komoditi Unggulan di Bidang Pertanian

Sulawesi Selatan

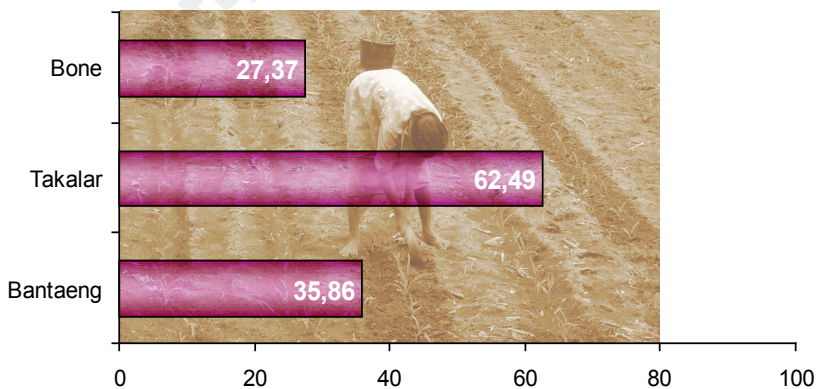
Padi merupakan komoditas pertanian unggulan di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Takalar (42,46 persen) cukup banyak rumah tangga yang mengusahakan tanaman padi dibandingkan Kabupaten Bone (35,22 persen) dan Bantaeng (24,13 persen).

Gambar 28. Persentase Rumah Tangga yang Mengusahakan Tanaman Padi di Sulawesi Selatan menurut Kabupaten, 2007



Sebagian besar rumah tangga tani di Kabupaten Takalar (62,49 persen) mempunyai lahan kurang dari 0,5 ha (petani gurem). Sementara persentase petani gurem di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone masing-masing sebesar 35,86 persen dan 27,37 persen.

Gambar 29. Persentase Rumah Tangga yang Mengusahakan Tanaman Padi di Sulawesi Selatan dengan Luas Lahan Kurang dari 0,5 Ha menurut Kabupaten, 2007



Sulawesi Barat

Kakao (coklat) merupakan komoditas unggulan di Sulawesi Barat. Di Kabupaten Polman terdapat 49,20 persen rumah tangganya mengusahakan tanaman coklat, sedangkan di Kabupaten Mamuju persentasenya lebih tinggi yaitu 66,23 persen. Rata-rata luas lahan tanaman coklat rumah tangga kabupaten polman lebih rendah dari kabupaten Mamuju, begitu pula rata-rata jumlah pohon yang diusahakan rumah tangga.

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga yang Mengusahakan Tanaman Coklat, Luas lahan dan Rata-rata Jumlah Pohon di Kabupaten Mamuju dan Polman, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007

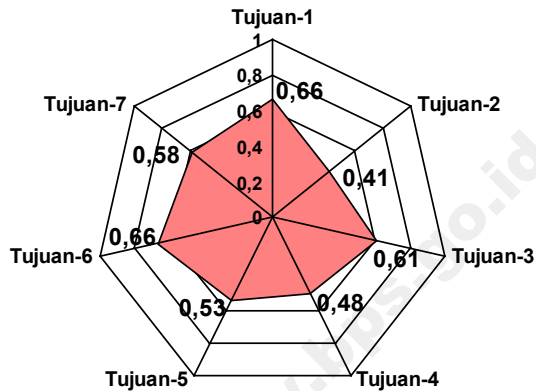
Kabupaten	Persentase rumah tangga yang mengusahakan tanaman coklat	Luas lahan (Ha)		Rata-rata jumlah pohon
		Total	Rata-rata per rumah tangga	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Polman	49,20	33.380	0,85	542,38
Mamuju	66,23	54.410	1,24	595,71

Visualisasi Pencapaian Tujuan MDGs di Kabupaten

Secara visual pencapaian setiap tujuan MDGs di masing-masing kabupaten dapat digambarkan dengan grafik sarang laba-laba. Data yang digambarkan berasal dari indeks komposit pada setiap tujuan. Penggambaran indeks komposit tersebut menggunakan asumsi bahwa setiap tujuan mempunyai bobot yang sama.

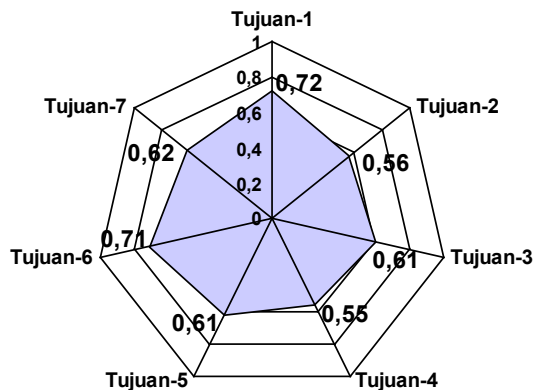
Indeks Komposit Kabupaten Bantaeng

Pencapaian tujuan 2 (*Mencapai Pendidikan dasar untuk semua*) di Kabupaten Bantaeng merupakan yang terendah. Indikator APM SD/MI dan APM SMP/MTs masing-masing sebesar 85,32 dan 50,08 persen, artinya banyak anak-anak lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs.



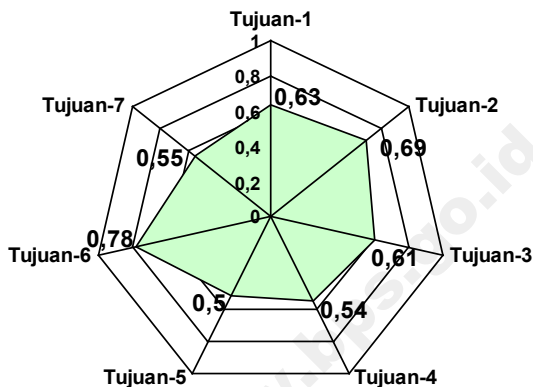
Indeks Komposit Kabupaten Takalar

Indeks komposit Kabupaten Takalar secara umum yang tertinggi dibanding kabupaten lainnya. Perhatian perlu diberikan pada pencapaian tujuan 2 (*Mencapai pendidikan dasar untuk semua*) dan tujuan 4 (*Menurunkan angka kematian anak*) karena masih lebih rendah dari tujuan lainnya.



Indeks Komposit Kabupaten Bone

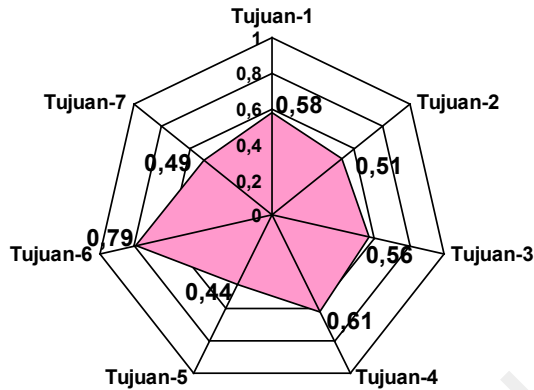
Pencapaian tujuan 5 (*Meningkatkan kesehatan ibu*) masih tertinggal dari pencapaian tujuan lainnya. Penyebabnya antara lain pemeriksaan K4 bagi ibu hamil baru mencapai 33,52 persen serta keikutsertaan pasangan usia subur (PUS) dalam program KB bagi baru mencapai 34,93 persen.



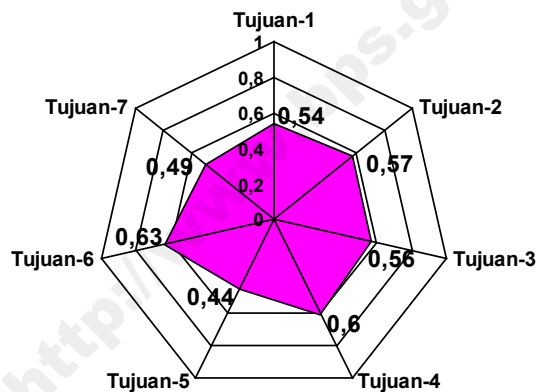
Indeks Komposit Kabupaten Polewali Mandar

Pencapaian tujuan-5 (*Meningkatkan kesehatan ibu*) di kabupaten Polman baru mencapai 0,44 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh fasilitas pelayanan persalinan dengan penolong kelahiran tenaga medis baru mencapai 30,51 persen. Selain daripada itu angka pemeriksaan K4 bagi ibu hamil baru mencapai 46,68 persen, dan penggunaan alat kontrasepsi bagi PUS juga masih cukup rendah karena baru mencapai 30,02 persen.

Adapun tujuan-7 (*Memastikan kelestarian lingkungan hidup*), besaran indeks kompositnya masih cukup rendah (0,49 %). Hal ini antara lain disebabkan oleh masih banyak rumah tangga yang tanahnya belum mempunyai sertifikat dari BPN yaitu baru mencapai 21,43 persen; kepemilikan sanitasi yang layak juga masih rendah (22,65 %) dan proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan baru mencapai 53,82 persen.



Indeks Komposit Kabupaten Mamuju



Tujuan-5 (*Meningkatkan kesehatan ibu*) dan tujuan-7 (*Memastikan kelestarian lingkungan hidup*) di Kabupaten Mamuju perlu untuk mendapatkan perhatian karena pencapaiannya masing-masing baru sebesar 0,44 dan 0,49 persen, yang berarti relatif tertinggal dibandingkan dengan pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Rendahnya pencapaian tujuan-5 antara lain disebabkan oleh persentase pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih masih rendah (27,99 %) dan kunjungan K4 juga masih cukup rendah yaitu baru mencapai 43,92 persen. Adapun rendahnya pencapaian tujuan-7, antara lain disebabkan oleh rendahnya kepemilikan sertifikat tanah dari BPN (33,19 %) dan kepemilikan sanitasi yang layak baru mencapai 20,79 persen

<http://www.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik

Gedung Badan Pusat Statistik Lantai 2
Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Kotak Pos 1003, Jakarta 10710
Telp.: +62 021 3506647 (direct)
+62 021 3841195, 3842508 ext. 1643 (hunting)
Homepage: <http://mdgs-dev.bps.go.id>
E-mail : bpsHQ@bps.go.id